

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al Atok, Rosyid. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press: 2015.
- Amiruddin, et al. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Ansori, Lutfil. *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Astomo, Putera. *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Edisi 1 Cetakan 1. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Fahmal, H. A. Muin. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Cetakan kedua. Jakarta: Total Media, 2008.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2016.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cetakan pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Susetio, Wasis. "Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Agraria". *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 10 No. 3, Desember 2013.

Syarifudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
_____. *Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216)*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)*.

_____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)*.

_____. *Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84)*.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Melalui Jalur Nonlitigasi.*

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 24 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135).*

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 127).*

_____. *Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 93/PUU-XV/2017.*

_____. *Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 49/PUU-IX/2011.*

C. Jurnal

Lailam, Tanto. “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum di Indonesia”, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jurnal Konstitusi* Volume 1 Nomor 1, Maret 2018.

Maiwan, Mohammad. “Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* Vol. 12, No. 2, April 2016, hal. 76.

Simatupang, Taufik H. “*Analisis Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-undangan di Daerah*”. (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI) *IKH* Vol. 12 No. 1 Maret 2018.

Sukardi dan E. Prajwalita Widiati. “Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan yang Lebih Rendah dan Akibat Hukumnya”. *Jurnal Yuridika* Vol. 27 No. 2, Mei-Agustus 2012.

D. Artikel/Makalah/Internet/Skripsi/Tesis

Anonim. *Portal Informasi Indonesia*, <https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan>, 6 Agustus 2019.

- Anonim. “Pendaftar Uji Materiil di MA Rata-Rata Sebulan Cuma Tiga”, <https://www.kai.or.id/berita/11530/pendaftar-uji-materiil-di-ma-rata-rata-sebulan-cuma-tiga.html>, 6 Agustus 2019.
- Attamimi, A. Hamid S. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Disertasi*, Jakarta, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Bayhaqi, Ahda. “PKPU dibatalkan MA, Bawaslu Minta KPU Revisi Aturan Larangan Eks Koruptor Nyaleg”, <https://www.merdeka.com/politik/pkpu-dibatalkan-ma-bawaslu-minta-kpu-revisi-aturan-larangan-eks-koruptor-nyaleg.html>, 26 Juli 2019.
- Dewansyah, Bilal. “Kedudukan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan>, 6 Agustus 2019.
- Ditjen PP, *Data Base Peraturan*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/database-peraturan/undang-undang.html>, 12 Juli 2019.
- Feri, Oscar. “Alasan MA Pungut Biaya Perkara Uji Materi Juta”, <https://www.liputan6.com/news/read/656378/alasan-ma-pungut-biaya-perkara-uji-materi-rp-1-juta>, 6 Agustus 2019.
- Hoesein, Zainal Arifin. “Culas Kritis Terhadap Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan Melalui Mediasi”, disampaikan dalam *Seminar* sehari yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Tarumanagara, 9 Mei 2019 di Universitas Tarumanagara.
- Mardatillah, Aida. “2018 MK Hanya Kabulkan 5 Pengujian UU: Sepanjang 2018, mulai ada lima UU yang paling sering diuji; penyelesaian penanganan perkara lebih cepat dibandingkan tahun 2017; hingga sisa perkara sebanyak 37 perkara yang lebih sedikit disbanding tahun 2017 sebanyak 49 perkara”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c500a0822228/2018--mk-hanya-kabulkan-15-pengujian-uu>, 29 Januari 2019.
- _____. “MA Diminta Cabut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Sengketa Konflik Norma”, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c2f82b639097/ma-diminta-cabut-permenkumham-sengketa-konflik-norma>, 5 Januari 2019.
- Rasji. “Pengujian Peraturan Kebijakan Di Indonesia (Objek Kajian Surat Edaran Pemerintah)”. *Jurnal Era Hukum* Vol. 16 No. 1, Juni 2016.

Saputra, Andi, *Babak Baru Kemenkum Bikin Pengadilan Obesitas Hukum*.
<https://news.detik.com/berita/d-3969135/babak-baru-kemenkum-bikin-pengadilan-obesitas-hukum>, 12 Juli 2019.

Sukmana, Yoga. “MA Usul Biaya Perkara Naik Jadi 5 Juta, Untu Apa Saja?”,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/10/07573471/ma-usul-biaya-perkara-naik-jadi-rp-5-juta-untuk-apa-saja>, 6 Agustus 2019.

E. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.